

**ANALISIS KEBIJAKAN ALTERNATIF PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA
SUKAWINATAN KOTA PALEMBANG**

**Rizka Alvionita Lestari¹, Nabila Salsabila², Cholina Aprilian Partangi Sinaga³, Marsa
Noveliya⁴, Cyntia Romauli Pangaribuan⁵, Junaidi⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

Email Korespondensi: cholinasinaga74@gmail.com

Email: rizkalvionitalestari@gmail.com; nabila070125@gmail.com;

marsanoveliya0911@gmail.com; cyntiapangaribuan@gmail.com

ABSTRACT

Waste management at the Sukawinatan Final Disposal Site (TPA) in Palembang City faces many complex and systemic challenges, including increasing waste volume, limited infrastructure, weak regulatory enforcement, and low public participation. This study aims to identify strategic issues and evaluate the effectiveness of current waste management policies. The research methods used include a literature review and an analysis of the status quo of waste management in the field through document review. The results reveal that the management system, which is still dominated by open dumping and the lack of environmentally friendly technologies, poses pollution risks and public health problems. Proposed policy recommendations include increasing the use of modern technologies such as sanitary landfills and waste-to-energy, strengthening institutional governance, and increasing active public participation. It is hoped that the implementation of these innovation- and sustainability-based policies will improve waste management efficiency, support environmental conservation, and sustainably improve the quality of life for communities surrounding the landfill.

Keywords: Sanitary Landfill, TPA Sukawinatan, Waste, Waste-to-energy.

ABSTRAK

Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan, Kota Palembang, menghadapi banyak tantangan yang bersifat kompleks dan sistemik, termasuk peningkatan volume sampah, terbatasnya infrastruktur, lemahnya penegakan regulasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi isu strategis serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi pustaka dan analisis kondisi status quo pengelolaan sampah di lapangan melalui kajian dokumen. Hasil penelitian mengungkap bahwa sistem pengelolaan yang masih didominasi oleh metode *open dumping* serta minimnya teknologi ramah lingkungan menimbulkan risiko pencemaran dan masalah kesehatan masyarakat. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi peningkatan penggunaan teknologi modern seperti *sanitary landfill* dan *waste-to-energy*, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Diharapkan, penerapan kebijakan berbasis inovasi dan keberlanjutan ini mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, mendukung pelestarian lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar TPA secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Sanitary Landfill*, TPA Sukawinatan, Sampah, *Waste-to-energy*.

PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu permasalahan klasik yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, meningkatnya aktivitas ekonomi, serta perubahan gaya hidup masyarakat turut memperbesar volume timbulan sampah setiap harinya. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir (UPTD TPA) Sukawinatan, rata-rata timbulan

sampah yang masuk mencapai 600-650 ton per hari, yang terdiri dari sampah organik, anorganik, hingga residu lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Palembang masih sangat bergantung pada TPA sebagai ujung tombak pengelolaan sampah (Amalia & Kusuma Putri, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, keberadaan TPA Sukawinatan saat ini menghadapi berbagai permasalahan yaitu Masalah pertama adalah overload kapasitas TPA, di mana TPA Sukawinatan mengalami kelebihan muatan sampah melebihi kapasitas dengan rata-rata 1.200 ton sampah per hari, sementara metode open dumping masih dipraktikkan meskipun dilarang. Masalah kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana, karena kurangnya alat berat memadai untuk pengolahan sampah sehingga menyebabkan penumpukan sampah di lokasi tertentu, ditambah pengelolaan lindi dan gas metana yang belum optimal sesuai standar. Masalah ketiga adalah pengelolaan limbah B3 tidak sesuai regulasi, di mana limbah berbahaya sering tercampur dengan sampah domestik dan limbah yang sudah dipisah tidak pernah dimusnahkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Masalah keempat adalah rendahnya penegakan hukum dan implementasi regulasi, terdapat ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan serta minimnya pengawasan sehingga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial. Masalah kelima adalah keterbatasan anggaran yang membatasi pelaksanaan penutupan sampah dan pengelolaan operasional optimal TPA. Masalah keenam adalah minimnya pemanfaatan gas metana dan energi dari sampah, di mana generator yang menggunakan gas metana hanya mampu beroperasi sekitar 4 jam per hari sehingga tidak optimal. Masalah ketujuh adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang memperbesar volume sampah tidak terkelola dengan baik di sumber, sehingga beban pengelolaan di TPA semakin berat.

Berbagai permasalahan di atas terjadi akibat dari berbagai faktor yang kompleks dalam pengelolaan sampah pada TPA Sukawinatan yang masih lemah antara lain: Masalah pertama adalah faktor kelembagaan, di mana lemahnya penegakan hukum dan koordinasi antarinstansi menyebabkan pengelolaan sampah tidak optimal, ditambah tumpang tindih kewenangan antara Dinas Lingkungan Hidup, UPTD TPA, dan instansi teknis lainnya yang memperburuk efektivitas kebijakan. Masalah kedua adalah faktor teknis, meliputi keterbatasan alat berat dan infrastruktur yang menyebabkan overload sampah serta tidak optimalnya metode controlled landfill, serta pengolahan lindi dan gas metana yang belum maksimal sehingga meningkatkan risiko pencemaran air dan udara. Masalah ketiga adalah faktor sosial dan budaya, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah tangga termasuk pencampuran limbah B3, serta ketergantungan masyarakat pada Sungai Musi yang memperbesar dampak pencemaran air akibat lindi. Masalah keempat adalah faktor ekonomi, mencakup minimnya anggaran operasional yang menyebabkan ketidakterpenuhan standar pengelolaan seperti penutupan tanah hanya dua kali setahun, serta potensi ekonomi dari daur ulang dan energi sampah yang belum dimaksimalkan sehingga TPA menjadi beban bukan sumber daya.

Keberadaan TPA Sukawinatan sendiri menimbulkan berbagai persoalan baru, jika pengelolannya masih menimbulkan masalah. Berbagai dampak akan bermunculan seperti: Dampak pertama adalah terhadap lingkungan, di mana tanpa kebijakan pengelolaan yang optimal, volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, memicu pencemaran udara, air, dan tanah serta potensi bencana seperti banjir akibat tersumbatnya drainase, ditambah penumpukan sampah organik yang menghasilkan gas metana berkontribusi pada pemanasan global. Kedua adalah terhadap kesehatan, karena sampah yang tidak terkelola menjadi sumber penyakit menular sebagai tempat berkembang biak vektor seperti nyamuk, lalat, dan tikus, sehingga meningkatkan kasus penyakit kulit, diare, infeksi saluran pernapasan, hingga demam berdarah dengue pada masyarakat sekitar. Ketiga adalah terhadap ekonomi, di mana beban biaya pemerintah dan masyarakat semakin tinggi untuk penanganan darurat, perawatan kesehatan, serta perbaikan lingkungan, padahal sampah yang dikelola baik bisa bernilai ekonomi melalui daur ulang dan prinsip ekonomi sirkular. Dampak keempat adalah terhadap sosial, karena kualitas hidup masyarakat menurun akibat lingkungan kotor, bau menyengat, hingga konflik sosial terkait lokasi pembuangan sampah, yang memengaruhi kenyamanan hidup dan citra daerah secara keseluruhan. Awalnya, TPA ini dibangun di pinggir kota. Namun, seiring perkembangan wilayah dan pembangunan perumahan,

kini kawasan TPA berada di tengah pemukiman masyarakat. Hal tersebut menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran udara akibat bau sampah, pencemaran air akibat lindi yang tidak terkelola optimal, hingga meningkatnya risiko penyakit kulit dan gangguan kesehatan lainnya bagi masyarakat dan pemulung yang beraktivitas di sekitar TPA (Saputra, 2015).

Kondisi regulasi saat ini untuk mengatasi masalah TPA Sukawinatan mencakup beberapa peraturan nasional dan daerah yang telah ada, namun implementasinya masih lemah dan belum sepenuhnya efektif. Regulasi pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, yang mengatur tanggung jawab dan kompensasi terhadap masyarakat terdampak, tetapi belum terlaksana sepenuhnya karena pemerintah belum memberikan kompensasi yang memadai bagi warga sekitar TPA. Kedua adalah Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan urug terkendali (*controlled landfill*), di mana Pasal 1 ayat 22 menetapkan standar penutupan sampah setiap tujuh hari sekali, namun di lapangan hanya dilakukan dua kali setahun akibat keterbatasan anggaran, serta Pasal 34 tentang pengelolaan limbah B3 yang sering tercampur dan tidak dimusnahkan.

Regulasi ketiga adalah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, khususnya Pasal 23 yang mewajibkan sampah tidak terdaur ulang diolah menjadi sumber energi di TPA, tetapi pengelolaan gas metana di Sukawinatan belum optimal karena keterbatasan alat dan sumber daya. Regulasi keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, yang mengharuskan pemisahan dan pemusnahan limbah berbahaya, namun praktik di TPA masih mencampur limbah B3 dengan sampah domestik sehingga regulasi ini belum terpenuhi.

Penelitian Memi (2015) dalam I Kadek Dwi Arta Saputra, tentang penyakit kulit yang terjadi pada pemulung di TPA Sukawinatan Palembang, didapatkan bahwa hasil kejadian gangguan kulit sebanyak 55,7%³. Dimana variabel karakteristik individu berupa masa kerja dan penggunaan APD berhubungan dengan kejadian gangguan kulit. Hal demikian merupakan salah satu dampak dari kurang baiknya pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan.

Pengelolaan sampah yang tidak baik akan berdampak buruk bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Hal demikian juga telah termaktub dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Kenyataannya TPA Sukawinatan masih belum memberikan jaminan yang layak bagi masyarakat dan lingkungan. Masyarakat masih banyak mengalami kesenjangan karena dampak pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan yang belum terpenuhi menurut peraturan perundang-undangan.

Berbagai penelitian tentang Pengelolaan sampah sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum dikaji dalam kerangka analisis kebijakan. Masalah kapasitas kelembagaan dan implementasi regulasi belum banyak dibahas melalui pendekatan analisis kebijakan menggunakan kriteria seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, kelayakan politik, dan kelayakan administratif. Atas keterbatasan riset sebelumnya tersebut maka penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian pengelolaan bank sampah dari teori Analisis kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan kelembagaan bank sampah serta menghasilkan alternatif kebijakan yang paling layak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Palembang. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan berorientasi penguatan kelembagaan agar bank sampah mampu berfungsi sebagai instrumen pengurangan sampah dari sumber secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis aktual (*status quo*) terkait kondisi pengelolaan sampah di Kota Palembang. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah jurnal, buku, laporan pemerintah, dan regulasi yang relevan, sedangkan analisis *status quo* digunakan untuk menggambarkan kondisi terkini kebijakan dan implementasi pengelolaan sampah sebagaimana terjadi di lapangan.

Analisis ini menggunakan model evaluasi William N. Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan) dan model implementasi Michael J. Hill. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan, khususnya pada efektivitas penerapan metode *controlled landfill*, peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi.

PEMBAHASAN

Pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan saat ini masih didominasi oleh metode pengelolaan *controlled landfill* yang dalam praktiknya belum sepenuhnya memenuhi standar teknis pengelolaan lingkungan. Keterbatasan alat berat, sistem pengolahan lindi yang belum optimal, serta pengelolaan gas metana yang belum terintegrasi dengan baik menyebabkan timbulnya pencemaran udara, tanah, dan air di sekitar lokasi TPA. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari sisi efektivitas, kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan utama perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

A. Analisis Substansi Masalah

1. Kebutuhan yang Belum Terpenuhi

Masyarakat yang tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sangat membutuhkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk menunjang kualitas hidup mereka. Namun, kenyataannya mereka justru harus menghadapi berbagai risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh bau menyengat dari tumpukan sampah serta pencemaran air akibat lindi yang tidak dikelola secara optimal.

Kondisi ini menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 telah mengatur mengenai pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak kegiatan pengelolaan sampah, hingga saat ini pemerintah belum menunjukkan tanggung jawab yang memadai dalam bentuk pemberian kompensasi yang sesuai bagi warga yang terkena dampak langsung.

2. Nilai yang Belum Terpenuhi

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur pengelolaan sampah, tanggung jawab pemerintah dalam implementasi dan penegakan hukum masih tergolong lemah. Sebagai contoh, kegiatan penutupan sampah dengan tanah yang seharusnya dilakukan setiap tujuh hari sekali hanya dapat dilaksanakan dua kali dalam setahun akibat keterbatasan anggaran. Di sisi lain, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat Kota Palembang dalam mengelola sampah juga masih rendah. Banyak warga yang belum terbiasa memilah sampah antara organik dan anorganik, sehingga hal tersebut mempersulit proses pemilahan dan pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

3. Kesempatan yang Belum Terpenuhi

Meskipun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan telah menerapkan metode *controlled landfill*, pelaksanaannya masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan karena keterbatasan dana serta alat berat yang tidak memadai. Kondisi ini menunjukkan perlunya penerapan teknologi yang lebih canggih dan peningkatan infrastruktur agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif dan ramah lingkungan. Selain itu, program daur ulang sampah anorganik menjadi kerajinan tangan juga masih belum memberikan dampak signifikan dalam mengurangi beban sampah. Terdapat peluang besar untuk mengembangkan sistem pemilahan dan daur ulang yang lebih optimal, dimulai dari tingkat rumah tangga, sehingga volume sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang secara bertahap. Di sisi lain, kurangnya koordinasi antarinstansi serta lemahnya pengawasan menyebabkan berbagai program pengelolaan sampah belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait agar permasalahan pengelolaan sampah dapat diselesaikan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan indikator efisiensi menurut William N. Dunn, pengelolaan TPA Sukawinatan masih menghadapi kendala pada aspek pembiayaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Biaya pengelolaan yang relatif besar belum sebanding dengan hasil yang diperoleh, karena volume sampah terus meningkat sementara kapasitas pengolahan terbatas. Hal ini juga berdampak

pada rendahnya tingkat kecukupan kebijakan, di mana upaya yang dilakukan pemerintah daerah belum mampu secara memadai mengatasi permasalahan sampah yang bersifat jangka panjang.

Dari aspek perataan, dampak negatif kebijakan pengelolaan sampah lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Sukawinatan, seperti pencemaran lingkungan dan risiko gangguan kesehatan. Sementara itu, manfaat kebijakan pengelolaan sampah cenderung dirasakan oleh masyarakat Kota Palembang secara umum. Ketimpangan distribusi dampak ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berjalan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan lingkungan.

No	Alternatif Kebijakan	Deskripsi Singkat	Keuntungan (<i>Pros</i>)	Kerugian (<i>Cons</i>)
1.	Peningkatan Teknologi Pengelolaan Sampah	Mengadopsi alat berat dan sistem canggih, seperti sistem pengolahan gas metana dan teknologi otomatisasi pengelolaan sampah	Meningkatkan efisiensi pengolahan, mengurangi <i>overloading</i> , dan memaksimalkan energi dari gas metana	Biaya investasi tinggi dan membutuhkan pelatihan khusus dan proses adaptasi memakan waktu
2.	Implementasi Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan 3R, edukasi, dan program partisipatif seperti bank sampah	Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan 3R, edukasi, dan program partisipatif seperti bank sampah	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, mengurangi volume sampah di TPA	Memungkinkan kurangnya kesadaran dan disiplin masyarakat, memerlukan <i>effort</i> besar dalam sosialisasi
3.	Pengelolaan Limbah B3 Secara Terpisah	Pemisahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sejak sumbernya dan pengelolaan khusus	Mengurangi kontaminasi di TPA, sesuai regulasi dan mengurangi risiko pencemaran	Menambah biaya operasional dan kebutuhan fasilitas khusus serta pengawasan ketat
4.	Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Energi dan Sistem pengoperasian Canggih	Membangun fasilitas pengolahan gas metana menjadi energi dan memperbaiki sistem operasional TPA	Meningkatkan pendapatan dari energi, mengurangi dampak pencemaran, memperbaiki sistem pengelolaan	Investasi awal besar, proses pembangunan memakan waktu, dan membutuhkan pemeliharaan berkelanjutan

Indikator responsivitas menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan belum sepenuhnya merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat sekitar. Meskipun pemerintah telah melakukan beberapa upaya perbaikan, seperti peningkatan pengangkutan sampah dan penyediaan alat berat, belum terdapat mekanisme partisipatif yang kuat untuk menampung aspirasi masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, dari sisi ketepatan, kebijakan yang ditetapkan masih kurang tepat sasaran lebih berfokus pada penanganan di hilir (TPA) dan belum secara optimal mendorong pengurangan sampah dari sumbernya. Alternatif kebijakan yang ditawarkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan meliputi penguatan teknologi, seperti penerapan *sanitary landfill* dan *waste-to-energy*, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan program 3R, serta

penerapan skema kemitraan publik-swasta. Penguatan teknologi memberikan potensi besar dalam menekan dampak lingkungan, namun membutuhkan investasi anggaran yang besar. Penguatan kelembagaan berperan penting dalam meningkatkan koordinasi antar instansi, khususnya antara DLHK, UPTD TPA, dan pihak swasta. Sementara itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya.

Ruang lingkup dan lokasi pengelolaan sampah dalam kajian ini difokuskan terutama pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sukawinatan yang berlokasi di Kota Palembang, yang saat ini menjadi pusat utama pengolahan sampah domestik dan sejenisnya dari masyarakat kota tersebut. TPA Sukawinatan dipilih sebagai objek studi karena merupakan fasilitas utama yang menangani volume sampah yang sangat tinggi, dikutip dari (Sihombing, 2023) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Palembang, potensi sampah di Kota Palembang adalah 1.200 ton per hari yang berasal dari 1,7 juta penduduk. Adanya volume sampah yang besar ini menunjukkan tingkat produksi sampah masyarakat Palembang yang cukup tinggi serta menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pengoperasiannya. Target utama dari pengelolaan sampah ini adalah berbagai pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung, termasuk Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sebagai pengelola utama TPA, komunitas masyarakat sekitar yang terdampak, termasuk para pemulung yang bergantung hidup dari sampah, dan pihak swasta maupun lembaga lain yang turut berperan dalam aspek teknis, regulasi, dan pengawasan. Secara khusus, penekanan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan sampah melalui pengintegrasian teknologi canggih dan pengembangan sistem pengelolaan energi dari gas metana yang dihasilkan TPA, serta penyusunan rencana strategis yang komprehensif dan berkelanjutan.

Jika ditinjau dari model implementasi kebijakan menurut Michael J. Hill, masih terdapat kelemahan pada aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, serta komitmen pelaksana di tingkat lapangan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan itu tidak hanya ditentukan oleh perumusan regulasi, tetapi juga oleh konsisten pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Alternatif kebijakan yang di analisis meliputi: (1) penerapan teknologi *sanitary landfill dan waste-to-energy*, (2) penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarinstansi, (3) peningkatan partisipasi dan edukasi masyarakat berbasis 3R, serta (4) penerapan skema kemitraan publik-swasta. Evaluasi terhadap keempat alternatif menggunakan kriteria Dunn menunjukkan bahwa alternatif peningkatan teknologi memiliki potensi dampak jangka panjang paling signifikan dalam menekan timbulan sampah dan mengurangi pencemaran, meskipun membutuhkan investasi awal yang besar. Penguatan teknologi memberikan dampak jangka panjang namun membutuhkan biaya besar. Penguatan kelembagaan berperan penting dalam kelola, sedangkan partisipasi masyarakat menjadi alternatif paling realistis dalam jangka pendek. Kemitraan publik-swasta dinilai mampu mempercepat modernisasi namun memerlukan pengawasan ketat.

Pernyataan Kebijakan (Policy Statement)

Ruang lingkup kebijakan ini berfokus secara spesifik pada evaluasi efektivitas operasional TPA Sukawinatan, dengan batasan kajian pada aspek teknis pengelolaan, kinerja pengolahan sampah, serta tata kelola kelembagaan, tanpa memasuki analisis mendetail mengenai sistem pengumpulan sampah di tingkat rumah tangga. Kebijakan ini berlandaskan pada kerangka hukum yang komprehensif, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menjadi payung hukum nasional. Secara operasional, kebijakan ini mengacu pada Pasal 1 ayat (22) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang mendefinisikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai fasilitas untuk melakukan pemrosesan akhir sampah. Di tingkat lokal, Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Sampah menegaskan kewajiban Pemerintah Kota untuk menyediakan dan mengelola TPA yang memenuhi standar.

Analisis ini akan mengkaji sejauh mana implementasi ketiga regulasi ini telah terwujud di TPA Sukawinatan. Aktor kunci yang menjadi fokus dalam implementasi dan evaluasi kebijakan ini meliputi Pemerintah Kota Palembang (sebagai penanggung jawab utama), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang (sebagai operator teknis), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (dalam peran pengawas dan pendukung), swasta yang bermitra dalam pengelolaan sampah, serta masyarakat dan LSM yang bukan hanya sebagai penerima dampak tetapi juga mitra dalam partisipasi. Kebijakan ini diyakini akan mencapai sasaran karena dirancang dengan pendekatan yang realistis dan terukur. Alasan utamanya adalah karena rancangan evaluasi berkelanjutan yang diusulkan secara langsung menasar akar masalah yang teridentifikasi dalam *status quo*, seperti rendahnya tingkat daur ulang dan ketidakefisienan operasional. Dengan mematok indikator kinerja yang jelas berdasarkan regulasi yang ada, kebijakan ini memungkinkan dilakukannya pemantauan yang objektif dan tindakan korektif yang tepat sasaran.

Analisis Alternatif Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan Kota Palembang, penelitian ini mengidentifikasi beberapa alternatif kebijakan yang berpotensi untuk mengatasi permasalahan secara komprehensif dan berkelanjutan. Alternatif kebijakan tersebut dirumuskan melalui proses analisis kualitatif dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, karakteristik permasalahan, serta konteks kebijakan daerah. Setiap alternatif memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda, baik dari aspek teknis, kelembagaan, sosial, maupun ekonomi.

1. Peningkatan Teknologi Pengelolaan Sampah (*Sanitary Landfill dan Waste-to-Energy*)

Alternatif ini berfokus pada modernisasi sistem pengelolaan sampah dengan mengubah metode controlled landfill menjadi sanitary landfill yang memenuhi standar lingkungan, serta mengembangkan teknologi *waste-to-energy (WtE)* untuk mengubah sampah menjadi energi listrik.

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Antarinstansi

Alternatif ini menekankan pada penguatan kapasitas kelembagaan serta koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pengelolaan sampah, seperti DLHK, Dinas PUPR, dan Dinas Energi. Pemerintah daerah dapat membentuk Unit Layanan Terpadu Pengelolaan Sampah (ULTPS) sebagai lembaga koordinasi yang mengintegrasikan kegiatan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah. Peningkatan kapasitas aparatur dapat dilakukan melalui pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, serta penerapan sistem monitoring digital berbasis data, seperti Sistem Informasi Pengelolaan Sampah (SIMPEL-Sampah).

3. Penguatan Partisipasi dan Edukasi Masyarakat

Alternatif ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. DLHK dapat bekerja sama dengan kelurahan, sekolah, dan komunitas lingkungan untuk membentuk Bank Sampah Mandiri serta program Sampah Jadi Rupiah. Masyarakat diberdayakan untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, sedangkan hasil pengumpulan dapat dijual atau ditukar dengan kebutuhan pokok. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban TPA tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap kebersihan lingkungan.

4. Penerapan Skema Kemitraan Publik-Swasta (*Public-Private Partnership/PPP*)

Alternatif ini menekankan kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pengelolaan dan pembiayaan pengolahan sampah untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah yang mana pemerintah dapat menjalin kontrak kerja sama dengan perusahaan pengelola limbah atau startup lingkungan dengan skema *Build-Operate-Transfer (BOT)* atau *Revenue Sharing*. Perusahaan swasta bertanggung jawab dalam tahap operasional, sementara pemerintah berperan dalam pengawasan dan penyediaan lahan. Dengan pola ini, diharapkan pengelolaan sampah lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.

Analisis Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan Metode perbandingan dijelaskan oleh Dunn (1981), seluruh alternatif kebijakan yang telah dirumuskan di bandingkan menggunakan kriteria evaluasi yang sama yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pertaan, responsivitas, ketepatan. Setiap alternatif diberikan nilai berdasarkan tingkat pencapaiannya terhadap masing-masing kriteria, dengan skala penilaian 1- 4 yaitu; 1 (tidak baik), 2 (kurang baik), 3 (cukup baik), 4 (sangat baik).

Hasil Evaluasi terhadap 4 alternatif kebijakan yang dilakukan dengan menggunakan kriteria dari (William N. Dunn, 2018) menunjukkan bahwa Peningkatan Teknologi (*Sanitary Landfill & Waste-to-Energy*) Alternatif ini mendapat skor tertinggi 3,1 karena sangat efektif mengurangi volume sampah dan menghasilkan energi dari gas metana, efisien jangka panjang meski investasi awal tinggi, serta cukup memenuhi kebutuhan lingkungan dan regulasi. Responsivitas tinggi terhadap overload TPA, meski pemerataan manfaat memerlukan kompensasi masyarakat terdampak, ketepatan selaras dengan PP No. 81/2012. Peningkatan Kelembagaan & Koordinasi dengan skor 2,2, alternatif ini efektif memperkuat sinergi antarinstansi seperti DLHK dan UPTD TPA, tapi kurang efisien akibat birokrasi lambat dan tumpang tindih kewenangan. Kecukupan rendah karena keterbatasan SDM, meski responsif terhadap masalah koordinasi; pemerataan dan ketepatan memadai untuk pengawasan. Penguatan Partisipasi & Edukasi Masyarakat Skor 2,0 mencerminkan efisiensi biaya rendah melalui bank sampah dan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), tapi efektivitas lambat karena perubahan perilaku memakan waktu. Cukup responsif tingkatkan kesadaran, namun pemerataan terbatas pada komunitas urban; ketepatan baik untuk regulasi partisipasi. Kemitraan Publik-Swasta (PPP) Berperingkat 2,3, alternatif ini efisien percepat inovasi teknologi via swasta, efektif kurangi beban APBD, dan cukup untuk pembiayaan. Responsivitas tinggi tapi berisiko konflik kepentingan yang kurangi pemerataan dan ketepatan tanpa pengawasan ketat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alternatif kebijakan yang di rekomendasikan adalah Alternatif Peningkatan Teknologi (*Sanitary Landfill & Waste-to-Energy*) karena sangat efektif mengurangi volume sampah dan menghasilkan energi dari gas metana, efisien jangka panjang meski investasi awal tinggi, serta cukup memenuhi kebutuhan lingkungan dan regulasi. Responsivitas tinggi terhadap overload TPA.

KESIMPULAN

Permasalahan pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan Kota Palembang mencerminkan adanya tantangan struktural yang masih belum teratasi secara optimal, terutama terkait keterbatasan kapasitas dan efektivitas metode pengelolaan yang digunakan. Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatnya potensi risiko kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis kebijakan, kebijakan pengelolaan sampah yang berjalan saat ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria efektivitas dan keberlanjutan. Faktor implementasi kebijakan, seperti ketersediaan sumber daya dan kapasitas aktor pelaksana, turut memengaruhi capaian kebijakan di tingkat lapangan.

Pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan Kota Palembang menghadapi tantangan overload kapasitas harian 1.200 ton, pencemaran lingkungan, dan risiko kesehatan masyarakat akibat keterbatasan teknologi serta koordinasi kelembagaan. Evaluasi menggunakan model William N. Dunn menegaskan bahwa peningkatan teknologi *sanitary landfill dan waste-to-energy* merupakan alternatif terbaik dalam efektivitas mengurangi penumpukan sampah serta memanfaatkan gas metana sebagai energi terbarukan. Pendekatan terintegrasi ini mengatasi celah kebijakan *status quo*, seperti penutupan sampah tidak optimal dan rendahnya partisipasi 3R, sehingga mendukung keberlanjutan lingkungan sesuai regulasi nasional.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu penguatan kebijakan pengelolaan sampah perlu diarahkan pada integrasi antara aspek teknologi, kelembagaan, dan partisipasi publik. Pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dapat dipertimbangkan sebagai upaya untuk mengurangi tekanan terhadap kapasitas TPA. Di samping itu, peningkatan koordinasi antaraktor serta penguatan kapasitas kelembagaan menjadi faktor pendukung penting dalam

pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumbernya juga perlu terus didorong sebagai bagian dari strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Alawiyah, T. (2024). Strategi Pengelolaan Sampah Kota Palembang Untuk Mendukung *Net Zero Emission*. *Journal of Plano Studies*, 3(1). Universitas Indo Global Mandiri. <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/jops/article/view/4676>
- Amalia, F., & Kusuma Putri, M. (2021). Analisis pengelolaan sampah anorganik di Sukawinatan Kota Palembang. *Jurnal Swarnabhumi*, 6(2).
- Apriyanti, D., & Fauzi, H. (2023). Optimalisasi Metode *Waste-to-Energy* dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Sumber Energi Terbarukan. *Jurnal Manajemen Energi dan Lingkungan*, 4(2).
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kota Palembang dalam angka 2024*. BPS Kota Palembang.
- Deselta, A., & Nugroho, A. (2021). Analisis pengelolaan sampah tempat pemrosesan akhir Sukawinatan dalam peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. *Jurnal Discretie*, 2(1), 1-12.
- DLHK Kota Palembang. (2023). *Laporan tahunan pengelolaan sampah Kota Palembang tahun 2023*. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.
- Fitri, A., & Putri, M. K. (2023). Analisis Pengelolaan Sampah Anorganik di Sukawinatan Kota Palembang. *Jurnal Swarna: Kajian Ilmu Sosial*, 7(1). Universitas PGRI Palembang. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/swarna/article/view/5452>
- Islami, R. R., et al. (2023). Analisis sistem pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 22(2), 179–188. <https://doi.org/10.14710/jkli.22.2.179-188>
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2013). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum
- Patton, C. V., & Sawicki, D. S. (1993). *Basic methods of policy analysis and planning* (2nd ed.). Prentice Hall.
- Pemerintah Kota Palembang. (2015). *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah*. Palembang: Pemerintah Kota Palembang.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rahayona, D., et al. (2023). Analisis Kualitas Lingkungan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat di Sekitar TPA Sukawinatan Palembang. *HIGIENE: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 9(2), 64–69.
- Saputra, I. K. D. A. (2015). Hubungan Masa Kerja dan Pemakaian APD dengan Gangguan Kulit pada Pemulung di TPA Sukawinatan Palembang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1).
- SIPSN. (2024). *Data timbulan dan pengelolaan sampah Kota Palembang*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Sukmaniar, S., et al. (2023). Bank Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Di Perkotaan. *Environmental Social Journal Online (ESJO)*, 5(2). Universitas PGRI Palembang. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/esjo/article/view/11960>
- Wibowo, A., & Lestari, P. (2022). Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di perkotaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 145–159.
- Wulandari, A. (2022). Analisis Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Palembang. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 8(3). Universitas Jambi